

ABSTRAK

Produk rokok merupakan sebuah produk yang tidak aman konsumsi karena memiliki 4000 kandungan beracun dan berbahaya. Salah satu kandungan beracun yang ada pada produk rokok bagi pengguna rokok maupun yang bukan pengguna rokok adalah tar dan nikotin. Rokok berdampak dari berbagai aspek baik ekonomi, moral, dan kesehatan masyarakat oleh karena itu perlunya pengaturan yang konsisten, tegas, dan mendetail terkait dengan pengaturan pencantuman label peringatan kesehatan dan informasi kesehatan khususnya pada label batasan pengkonsusmisan kandungan tar dan nikotin yang kurang tegas yang juga menjadi permasalahan pada topik penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan data yang diperoleh dengan mengkaji peraturan – peraturan serta literatur yang berkaitan. Hasil yang di inginkan dalam penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa adanya keteledoran pemerintah dalam memberikan pengawasan terhadap industri rokok yang tidak mengikuti anjuran di dalam Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2017. akibat dari kurangnya informasi terkait dengan “tidak ada batas aman” pengkonsusmian kandungan tar dan nikotin maka tidak memenuhi hak-hak konsumen baik hak keamanan, hak keselamatan, dan juga hak Asasi informasi atas produ rokok.

Kata Kunci : Politik Hukum, Rokok, Tar dan Nikotin

ABSTRACT

Cigarette products are products that are not safe for consumption because they contain 4000 harmful and dangerous ingredients. One of the content in cigarette products for both cigarette users and non-cigarette users is tar and nicotine. Because cigarettes have an impact on various aspects, both economic, moral, and public health, the need for consistent, firm, and detailed regulation related to the regulation of health warning labels and health information, especially on labels for limits on tar and nicotine content, which is less clear, is also a problem in this topic. this research. This study uses a normative legal research method with a statutory approach with data obtained by reviewing regulations and related literature. The desired result in this study is to show that there is negligence by the government in providing supervision to the cigarette industry which does not follow Government Regulation No. 109 of 2012 in conjunction with Minister of Health Regulation No. 56 of 2017. As a result of the information related to "there is no information related to the "safe limit" of consuming tar and nicotine content, it does not fulfill consumer rights, both safety rights, safety rights, and also human rights information on cigarette products.

Keywords: Legal Politics, Cigarettes, Tar and Nicotine